



WELCOME TO BATAM

LAPORAN KUNKER PANJA OI KE BP BATAM DAN KEKINONGSA DIGITAL PARK

Batam, 1-3 Juli 2025



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



LAPORAN KUNKER PANJA OI KE BP BATAM DAN KEK NONGSA DIGITAL PARK

Batam, 1-3 Juli 2025





**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) ORGANISASI INTERNASIONAL
BKSAP DPR RI
KE BADAN PENGUSAHAAN BATAM
DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA DIGITAL PARK
BATAM, 1-3 JULI 2025**

Latar Belakang

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, Panja Organisasi Internasional (Panja OI) BKSAP DPR RI dibentuk untuk mengawal proses akses Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) serta memperkuat peran keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Kedua keanggotaan ini strategis untuk mendorong transformasi kebijakan domestik sekaligus mengamankan posisi Indonesia di tataran global sebagai negara ekonomi besar dan pemimpin Global South.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kesiapan institusi dan kawasan strategis di dalam negeri yang dapat mencerminkan kesesuaian dengan standar, nilai, dan prinsip OECD serta aspirasi kolaborasi Global South dalam BRICS. Salah satu kawasan yang relevan untuk dikaji adalah Batam, khususnya:

1. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai institusi pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yang telah mengadopsi kebijakan reformasi kelembagaan, investasi, dan digitalisasi layanan publik.
2. Nongsa Digital Park (NDP) sebagai contoh pengembangan ekosistem ekonomi digital berbasis kolaborasi internasional dan pengembangan talenta lokal, yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Digital (KEK Digital).

Batam menunjukkan potensi strategis melalui perannya sebagai KEK dan zona perdagangan bebas dekat Singapura. Sebagai pusat manufaktur, penghubung logistik, dan pengembangan infrastruktur digital, Batam juga memperlihatkan kesiapan struktural dan kelembagaan yang relevan untuk mendukung standar OECD dan kolaborasi global seperti dalam BRICS.

Sebagai manifestasi dari fungsi DPR RI dalam pengawasan dan diplomasi parlemen, Panja OI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses akses Indonesia ke OECD dan partisipasi aktif dalam BRICS tidak hanya bersifat simbolik, melainkan berbasis kesiapan institusional di dalam negeri dan selaras dengan kepentingan nasional. Kunjungan ini diharapkan menjadi instrumen pengawasan berbasis bukti (*evidence-based oversight*) sekaligus memperkuat fungsi diplomasi parlemen.

Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan ini diagendakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari BP Batam dan Nongsa Digital Park yang relevan dengan indikator reformasi kebijakan dan regulasi OECD, termasuk ease of doing business, keterbukaan investasi, digital governance, dan green economy.
2. diplomasi ekonomi Indonesia dalam BRICS, khususnya pada bidang transformasi digital, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas negara.
3. Menggali aspirasi, tantangan, dan peluang dari pihak BP Batam dan pengelola NDP dalam menyambut reformasi struktural yang selaras dengan OECD dan visi kolaborasi Global South.
4. Menyusun masukan berbasis lapangan untuk mendukung kerja Panja Organisasi Internasional dalam merumuskan rekomendasi parlemen terhadap kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional.

I. Jadwal Kunjungan Kerja

Kunjungan ini memiliki jadwal sebagai berikut:

No.	Hari, tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 1 Juli 2025	Penerbangan Jakarta-Batam
2.	Rabu, 2 Juli 2025 13.015 - 14.45	Pertemuan dengan BP Batam dan Nongsa Digital Park Lokasi: Kantor BP Batam
3.	Rabu, 2 Juli 2025 15.15 – 16.30	Kunjungan ke Nongsa Digital Park Lokasi: Kawasan Nongsa Digital Park
4.	Kamis, 3 Juli 2025	Penerbangan Batam-Jakarta

Peserta Kunjungan

Panja Organisasi Internasional (OI)

- Ravindra Airlangga (Wakil Ketua BKSAP DPR RI/Ketua Panja)
- Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Anggota Panja)
- Trinovi Khairani, B.A. (Anggota Panja)
- Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si. (Anggota Panja)
- Dr. Hj. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P. (Anggota Panja)
- Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si. (Anggota Panja)
- Surya Utama, S.I.P. (Anggota Panja)
- Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M. (Anggota Panja)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

- Fary Djemi Francis (Deputi BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan)
- Alexander Zulkarnain (Deputi BP Batam Bidang Administrasi dan Keuangan)

- Sudirman Saad (Deputi BP Batam Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan)
- Syarlin Joyo (Deputi BP Batam Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi)
- Ruslan Aspan (Deputi BP Batam Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang)
- Ariastuty Sirait (Deputi BP Batam Bidang Pelayanan Umum)

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (KEK Nongsa)

- Peter Vincent (Direktur PT Taman Resor Internet, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa)



KUNJUNGAN KE BP BATAM

Sambutan dari BP Batam

Agenda kunjungan ke BP Batam diawali dengan sambutan dari Fary Djemi Francis, Deputi BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan, yang menyampaikan permohonan maaf dari Ketua dan Wakil Ketua BP Batam yang tidak dapat menghadiri agenda dengan Panja OI BKSAP karena mengikuti sidang paripurna dengan DPRD Kota Batam dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam. Fary Francis kemudian menyampaikan presentasi yang berjudul Mewujudkan Batam sebagai Pusat Investasi Global.



Gambar 1.0 Ketua dan Anggota Panja Organisasi Internasional DPR RI dan Perwakilan BP Batam

Menurut presentasi tersebut, BP Batam menargetkan transformasi Batam sebagai pusat investasi global melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi dan perizinan berbasis risiko, penyetaraan insentif antara *free trade zone* (FTZ) dan KEK, hingga peningkatan transparansi layanan dan koordinasi *multistakeholder*. Didukung pertumbuhan ekonomi yang konsisten melampaui rata-rata nasional dan proyeksi investasi mencapai Rp304,9 triliun pada 2025-2029, Batam memiliki daya tarik kuat bagi penanaman modal asing (PMA), terutama dari negara-negara seperti Tiongkok dan Singapura. Selain penguatan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jembatan penghubung antar-pulau, BP Batam juga mendorong pengembangan energi hijau melalui PLTS apung dan BESS, serta mendukung kawasan strategis seperti KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic. Berbagai tantangan seperti SDM vokasi dan harga gas direspons dengan inovasi kelembagaan seperti Desk Percepatan Investasi, Tim Koordinasi Vokasi, dan penunjukan Duta Investasi Batam untuk menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 1.1 Deputi BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Djemi Francis, menyampaikan sambutan



Sambutan dari Ravindra Airlangga, Wakil Ketua BKSAP DPR RI/Ketua Panja

Ketua Panja menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan regulasi, termasuk revisi UU Statistik, yang di dalamnya harus tertulis bahwa data statistik tidak dipengaruhi unsur politis. Beliau juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Batam yang secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dan bahkan melampaui standar pertumbuhan negara-negara OECD. Dalam konteks menarik investasi langsung, Ketua Panja mendorong agar BP Batam dapat berbagi praktik baik, seperti keberhasilan sektor energi hijau di Batam di mana Singapura juga memanfaatkan listrik dari Batam.



Gambar 1.2
Ketua Panja
Organisasi
Internasional,
Ravindra Airlangga
menerima
cinderamata dari
BP Batam

Tanggapan dari Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, Anggota Panja

Rahayu Saraswati menyoroti bahwa persoalan pertanahan di Batam merupakan tantangan luar biasa yang perlu segera diatasi secara sistematis. Ia menekankan pentingnya transparansi tata kelola lahan sebagai syarat mutlak untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor asing. Selain itu, isu pekerja migran non-profesional yang datang ke Batam juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ketenagakerjaan di daerah. Selain itu, penting bagi BP Batam untuk membangun pipeline talenta yang terarah dan berdaya saing, agar pertumbuhan investasi diiringi dengan penguatan kapasitas SDM lokal yang dapat mengisi peluang kerja secara berkelanjutan.

Gambar 1.3 Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo menekankan
pentingnya transparansi tata
kelola lahan diiringi dengan
penguatan kapasitas SDM lokal



Tanggapan dari Dr. Hj. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P., Anggota Panja

Arzeti Bilbina menyampaikan bahwa Indonesia harus berani mengambil peran sebagai pemain aktif dalam arus investasi dan inovasi global, bukan sekadar menjadi pasar. Dalam konteks tersebut, ia memberikan apresiasi atas capaian pembangunan telah dilakukan oleh BP Batam, yang dinilai layak menjadi *role model* nasional. Dengan potensi kawasan dan ekosistem yang terus berkembang, Batam dinilai sangat tepat untuk diarahkan menjadi pusat inovasi nasional sekaligus simpul kerja sama ekonomi internasional yang berbasis teknologi dan nilai tambah.



Gambar 1.4

Dr. Hj. Arzeti Bilbina Setyawan memberikan apresiasi atas capaian pembangunan telah dilakukan oleh BP Batam, yang dinilai layak menjadi *role model* nasional

Tanggapan dari Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si., Anggota Panja

Dewi Coryati menekankan pentingnya kewajiban alih teknologi dalam setiap investasi yang masuk, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Ia mendorong agar mahasiswa dan siswa SMK diberi akses langsung ke dunia industri, sehingga saat lulus mereka sudah siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ia merujuk pada model Jerman, yang telah sukses mengintegrasikan system Pendidikan dengan dunia kerja melalui skema *match and link* sejak jenjang sekolah menengah, sebagai contoh yang bisa diadaptasi di Batam.



Gambar 1.5

Dr. drh. Hj. Dewi Coryati Berpesan dan alih teknologi dalam setiap investasi harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Tanggapan dari Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M., Anggota Panja

Hillary Lasut menyoroti pentingnya melakukan evaluasi terhadap insentif yang telah diberikan kepada investor, agar DPR dan publik dapat mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal secara nyata.

Gambar 1.6 Dr. Hillary Brigitta Lasut menekankan pentingnya evaluasi terhadap insentif yang diberikan kepada investor agar bisa diawasi sampai sejauh mana dampaknya secara nyata



KUNJUNGAN KE KEK NONGSA

Kunjungan kerja Panja OI ke KEK Nongsa diawali dengan peninjauan langsung ke area Nongsa Digital Park (NDP) untuk melihat perkembangan fisik kawasan serta kemajuan infrastruktur penunjangnya. Delegasi mengelilingi kawasan NDP seraya mendengarkan penjelasan terkait rencana pengembangan kawasan digital yang ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi di Indonesia.



Gambar 2.0 Kunjungan Panja Organisasi Internasional ke Nongsa Digital Park, Batam

Setelah itu, delegasi Panja OI mengunjungi sejumlah institusi strategis dan perusahaan berbasis teknologi tinggi yang beroperasi di dalam kawasan NDP. Di antaranya adalah Apple Developer Academy dan pelatihan bersertifikasi yang didukung oleh Dell yang berperan penting dalam membangun talenta digital lokal melalui pelatihan intensif pengembangan aplikasi. Selain itu, delegasi juga mengunjungi Infinite Frameworks Studios, studio animasi dan konten digital kelas dunia yang menjadi salah satu pionir ekonomi kreatif Indonesia di kancah internasional. Studio ini juga memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat dalam setiap proyek kreatif yang dijalankan. Kunjungan ini menjadi bukti konkret bahwa KEK Nongsa tidak hanya menawarkan ekosistem bisnis yang kompetitif, tetapi juga menjadi model kolaborasi antara pendidikan, industri, dan inovasi digital.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kunjungan kerja Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI ke BP Batam dan KEK Nongsa memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan Batam sebagai pusat pertumbuhan investasi dan inovasi global yang selaras dengan agenda reformasi nasional dalam kerangka akses OECD dan penguatan posisi Indonesia di BRICS.

Di BP Batam, Panja OI mencatat bahwa institusi ini telah melakukan berbagai inovasi kelembagaan, penyederhanaan regulasi, serta mendorong transformasi ekonomi kawasan berbasis investasi hijau dan digital. Pertumbuhan ekonomi Batam yang konsisten melampaui rata-rata nasional serta tingginya minat penanaman modal asing menunjukkan daya tarik Batam yang strategis. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu ditangani, seperti persoalan pertanahan, kesiapan SDM vokasi, dan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas insentif investasi.

Kunjungan ke KEK Nongsa menunjukkan bahwa kawasan ini telah tumbuh menjadi ekosistem digital yang menjanjikan. Kunjungan ke Apple Developer Academy, pelatihan bersertifikasi yang disponsori oleh Dell, serta Infinite Frameworks Studios memperlihatkan kuatnya sinergi antara pendidikan, industri, dan inovasi. KEK Nongsa telah menjadi contoh nyata kolaborasi sektor publik dan swasta dalam mendorong talenta digital, ekonomi kreatif, dan integrasi teknologi dalam pembangunan nasional.

Saran

1. Penguatan tata kelola dan transparansi lahan sebagai prasyarat reformasi OECD.

OECD menekankan pentingnya regulatory quality dan iklim investasi yang transparan. Maka, penyelesaian persoalan pertanahan, baik di Batam maupun di lokasi lain di Indonesia, perlu dikawal sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap reformasi struktural dalam proses akses. BKSAP dapat menyampaikan kepada Komisi II DPR RI untuk mendorong agar ada standar tata kelola lahan yang menjamin kepastian hukum, akses publik terhadap data pertanahan, dan perlindungan terhadap hak investor sebagai bagian dari mendukung akses Indonesia ke OECD.

2. Evaluasi dampak insentif sebagai bukti reformasi berbasis data (*evidence-based policymaking*).

Salah satu pilar akses OECD adalah kemampuan negara menyusun kebijakan berdasarkan data. Pemerintah dan BP Batam perlu menyusun mekanisme evaluasi insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan kepada investor, agar kebijakan dapat ditinjau secara periodic berdasarkan dampaknya terhadap lapangan kerja, produktivitas, dan nilai tambah lokal.

3. Alih teknologi dan pembangunan talenta lokal sebagai komitmen terhadap *human capital development*.

Dalam forum BRICS dan juga dalam kerangka evaluasi OECD (khususnya Education & Skills), investasi harus mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal. Model *match and link* antara dunia pendidikan dan industri dapat dijadikan rujukan, khususnya dalam menyiapkan *pipeline* talenta vokasi dan digital sejak sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

4. Pemanfaatan KEK digital sebagai bukti reformasi ekonomi digital dan inklusi teknologi.

KEK Nongsa dapat dijadikan studi kasus Indonesia dalam komitmennya terhadap transformasi digital dalam proses akses OECD dan forum BRICS. Pemerintah perlu mendukung replikasi kawasan serupa dengan tata kelola data yang sejalan dengan prinsip-prinsip OECD (*data governance, cybersecurity, privacy*), sekaligus memperkuat kerja sama teknologi dengan mitra BRICS seperti India dan Tiongkok.

5. Penataan migrasi tenaga kerja dalam kerangka stabilitas sosial dan pemerataan manfaat ekonomi global.

Sebagai bagian dari perhatian OECD dan BRICS terhadap inklusi sosial dan transisi yang adil (*just transition*), masuknya pekerja migran non-profesional ke Batam perlu dikelola dengan pendekatan kebijakan yang adil dan adaptif. BP Batam bersama kementerian terkait perlu Menyusun strategi perlindungan sosial dan penguatan kapasitas lokal agar manfaat globalisasi investasi tidak menciptakan tekanan sosial baru.

6. Penguatan peran Batam sebagai Hub Kolaborasi Global Selatan (*Global South*)

Dalam kerangka keanggotaan BRICS, Batam dapat diarahkan menjadi salah satu pusat inovasi, logistik, dan industri teknologi bagi kerja sama Selatan-Selatan. Pemerintah dan DPR RI dapat mendorong Batam sebagai lokasi percontohan proyek bersama BRICS, seperti pusat riset bersama dan pertukaran talenta digital.



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id